

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan negara.

Bangsa Indonesia tidak mungkin selamanya mengandalkan sumber pendapatan negara dari sektor migas saja, sebab sumber daya alam Indonesia saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan mungkin tidak dapat diperbaharui lagi. Mengetahui hal tersebut maka pemerintah mengupayakan pengoptimalan sumber penerimaan negara dari sektor yang lain. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam mengupayakan pengoptimalan sumber penerimaan negara dari sektor yang lain. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Manfaat pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah guna pembangunan untuk negara.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak negara, sehingga hasil pemungutannya merupakan sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan secara periodik yaitu setahun sekali dengan terutangnya pada akhir tahun. Dalam rangka melaksanakan semua aktivitas perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan

untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh Surat Setoran Pajak (SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak yang akan menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan alamat terdaftar atau domisili para wajib pajak.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor pajak, untuk itu Pemerintah sangat mengharapkan tumbuhnya kesadaran dari diri wajib pajak untuk tidak meninggalkan dan melalaikan kewajibannya dalam hal pembayaran atas pajak yang terutang.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang penduduk Kota Semarang wilayah Semarang Barat yang berjumlah 176.564 jiwa baru sekitar 80.000 pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau sekitar 45%. Untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin, Pemerintah telah berusaha keras dengan berbagai cara untuk memberitahukan kepada para wajib pajak bahwa betapa pentingnya pajak itu bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan Nasional demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang tenteram, sejahtera, adil dan makmur. Walaupun pemerintah sudah memberikan banyak sosialisasi melalui pemyuluhan tentang masalah perpajakan, namun banyak juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah perpajakan yang masih belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya cara mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi ini dapat dilakukan dengan cara manual atau melalui sistem elektronik.

Uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi

merupakan langkah awal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dibahas permasalahan yang berjudul “MEKANISME PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT“.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika urutan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat?
2. Apa saja sanksi apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi?
3. Hal-hal apa yang menyebabkan Wajib Pajak tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi?
5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam meningkatkan jumlah pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
2. Untuk mengetahui sanksi apabila wajib pajak tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

3. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan wajib pajak tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
4. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam meningkatkan jumlah pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

1.4 Manfaat Penulisan

Penyusunan tugas akhir memiliki beberapa kegunaan atau manfaat bagi beberapa pihak, manfaat tersebut yaitu:

1. Bagi keilmuan

Penyusunan tugas akhir yang telah diselesaikan oleh penulis dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan dan wawasan berbagai pihak mengenai pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

2. Bagi praktisi

Penyusunan tugas akhir dapat menjadi bahan masukan bagi wajib pajak akan pentingnya mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi untuk ikut berpartisipasi dalam masalah keuangan negara Indonesia demi terciptanya tujuan negara yang nantinya akan ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

3. Bagi kebijakan

Penyusunan tugas akhir dapat menjadi tolak ukur Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan mengenai pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan tugas akhir ini membutuhkan informasi yang cukup dan memadai, untuk itu diperlukan beberapa data. Data-data yang akurat diharapkan dapat disajikan dalam penyusunan tugas akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah :

1. Data primer

Data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat untuk mengetahui mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

Cara perolehan data primer ini adalah:

a. Wawancara

Perolehan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mengenai materi tugas akhir.

b. Observasi

Kegiatan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

2. Data Sekunder

Data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak dari luar yang sudah dibukukan serta dipublikasikan seperti dasar-dasar dari pengertian dan penjabaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Cara perolehan data sekunder ini adalah:

a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi tugas akhir.

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan materi tugas akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam tugas akhir yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang penulisan, ruang lingkup Penulisan, tujuan penulisan tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

Bab ini menjelaskan tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, visi misi dan lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, struktur organisasi, tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, diskripsi jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, dan kegiatan operasional.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK MEKANISME PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI

Bab ini menjelaskan teori tentang pengertian pajak, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, dokumen yang diperlukan untuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, penerbitan nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang terdiri dari mekanisme pendaftaran secara tertulis/langsung dan mekanisme pendaftaran melalui *e-Registration*, sanksi tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, Hal-hal yang menyebabkan

wajib pajak tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, serta upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat untuk meningkatkan jumlah pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang dibahas pada BAB III.